



Kapabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Riau Dalam Mencegah Peningkatan Positivity Rate Covid-19 Varian Omicron di Provinsi Riau Tahun 2022



Nurul Mutmainnah Jamil*, Dyah Vinianti, Nadhila Adani
 Program Studi Manajemen Bencana, Universitas Pertahanan RI
 *Email: jamilnurul77@gmail.com

ABSTRACT

[The Capability of Riau Provincial Health Office in Preventing The Increase of Covid-19 Omicron Variant Positivity Rate in Riau Province in 2022] The cause of COVID-19, namely SARS-CoV-2, continues to mutate form a new variant. The latest variant that has been detected, namely variant Omicron or known as variant B.1.1.529, has a speed of high transmission rate up to 5 times that of the previous variant, including Delta variant. Since the last peak of daily Covid-19 cases was in July 2021 hits 56,000 new cases per day, for the first time in 2022 new case rate hits 64,147 positive confirmed cases as of 16 February 2022, especially in Riau Province, there was an additional of new active cases 539. This figure is considered quite high because Riau Province is included in the top 10 province with the highest number of positive cases at this time. The purpose of this research is to analyze the capability of the Riau Provincial Health Office in preventing a drastic increase in the positive rate. Based on research results the capability of the Riau Provincial Health Office in preventing an increase in the positivity rate The omicron variant focuses on mitigation and preparedness enhancement including: (1) promotion of healthy lifestyles and tightening of 3M implementation, (2) restrictions community activities, (3) acceleration of vaccines and, (4) provision of facilities and infrastructure hospital. The conclusion in this research despite the Covid-19 prevention the omicron variant is already quite good in Riau Province, some efforts are needed increased by the local government in anticipating the worst-case scenario if The positive rate jumped high considering the challenges in handling Covid-19 from geographical aspects and the availability of laboratory facilities that have not been maximized.

Keywords: *Capability; Covid-19; Positivity Rate; Omicron; Vaccine.*

ABSTRAK

Virus penyebab Covid-19 yaitu SARS-CoV-2 terus mengalami mutasi membentuk varian baru. Varian terbaru yang telah terdeteksi, yaitu varian Omicron atau yang dikenal sebagai varian B.1.1.529, memiliki kecepatan penularan yang tinggi hingga mencapai 5 kali lipat dari varian sebelumnya termasuk varian Delta. Sejak terakhir puncak kasus harian Covid-19 pada bulan Juli 2021 lalu menyentuh angka 56.000 kasus baru per hari, untuk pertama kalinya di tahun 2022 tingkat kasus baru menyentuh angka 64.147 kasus konfirmasi positif per tanggal 16 Februari 2022 terkhusus Provinsi Riau, terjadi penambahan kasus aktif baru sebanyak 539. Angka ini dinilai cukup tinggi karena Provinsi Riau termasuk ke dalam 10 besar provinsi dengan jumlah kasus positif terbanyak saat ini. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kapasitas Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam mencegah peningkatan *positivity rate* yang melonjak drastis. Berdasarkan hasil penelitian kapasitas Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam mencegah peningkatan *positivity rate* varian omicron berfokus pada mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan diantaranya: (1) promosi pola hidup sehat dan pengetatan pemberlakuan 3M, (2) pembatasan kegiatan masyarakat, (3) percepatan vaksin serta, (4) penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit. Kesimpulan dalam penelitian ini meskipun penanggulangan Covid-19 varian omicron sudah tergolong baik di Provinsi Riau, beberapa upaya perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah dalam mengantisipasi skenario terburuk apabila *positivity rate* melonjak tinggi mengingat tantangan dalam penanganan Covid-19 dari aspek geografis serta ketersediaan fasilitas laboratorium yang belum maksimal.

Kata kunci: *Kapabilitas; Positivity Rate; Omicron; Vaksin.*

PENDAHULUAN

Konsep keamanan nasional insani yang saat ini diutamakan di Indonesia sebagai perwujudan salah satu tujuan negara kita yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah merupakan bentuk perwujudan dari tujuan tersebut. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan telah dinyatakan oleh organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO) sebagai *Global Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020 merupakan salah satu bentuk bencana yang dapat mengancam keamanan nasional. Salah satu daerah yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 ini adalah Provinsi Riau. Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang terkait wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan ASEAN. Batas-batas wilayah sebagai berikut sebelah Utara: Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat, Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Barat, Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka. Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah $\pm 90.128,76 \text{ km}^2$ dimana luas daratan sebesar 89.083,57 (98,8%) dan luas lautan/perairan 1.045,19 (1,2%). Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota dengan jumlah penduduk 6.394.090 jiwa/kepadatan penduduk atau 96,46 jiwa/km. Sejak masuk ke Indonesia di bulan Maret 2020, virus penyebab Covid-19 yaitu SARS-CoV-2 terus mengalami mutasi membentuk varian baru. Varian terbaru yang telah terdeteksi, yaitu varian Omicron yang dikenal sebagai varian B.1.1.529 dimana varian ini pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan pada tanggal 24 November 2021 dan saat ini telah menyebar ke seluruh dunia (Kominfo, 2021). Varian Omicron memiliki kecepatan penularan yang tinggi hingga mencapai 5 kali lipat dari varian sebelumnya termasuk varian Delta (Amalia, 2021).

Sejak terakhir puncak kasus harian Covid-19 pada bulan Juli 2021 menyentuh angka 56.000 kasus baru per hari, untuk pertama

kalinya di tahun 2022 tingkat kasus baru menyentuh angka 64.147 kasus konfirmasi positif per tanggal 16 Februari 2022 (Satgas Covid-19, 2022).

Khusus Provinsi Riau, pada hari yang sama terjadi penambahan kasus aktif baru sebanyak 539 (corona.riau.go.id, 2022). Karena penambahan kasus yang meningkat pada tanggal 15 Februari 2022 meningkat ke zona risiko tinggi Covid-19 pada Ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru, yang sebelumnya di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Riau berada pada zona risiko rendah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 per 06 Februari 2022. Provinsi Riau termasuk ke dalam 10 Provinsi dengan jumlah kasus terbanyak dari 35 provinsi di Indonesia yakni sebesar 131.499 per tanggal 16 Februari 2022 (covid19.go.id, 2022). Selain kasus konfirmasi positif yang termasuk tinggi di Provinsi Riau juga belum mencapai *herd immunity* dengan minimal capaian 80% dari jumlah penduduk atau sasaran penduduk yang divaksin sebanyak 4.840.347 jiwa dengan dosis lengkap. Dengan begitu perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kapasitas Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam mencegah peningkatan *positivity rate* di seluruh kabupaten/kota agar tidak melonjak naik dan tantangan serta hambatan dalam penanggulangan Covid-19.

TINJAUAN PUSTAKA

Pentahelix adalah kerjasama antar berbagai unsur seperti pemerintah, industri, akademisi, masyarakat dan media. Pada awalnya konsep ini merupakan pendekatan yang dipilih oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi bencana di Indonesia (Syapitri, Tarigan, dan Saragih, 2021). Namun sekarang kerangka kerja pentahelix yang diperkenalkan oleh masyarakat penanganan bencana juga dapat diterapkan pada konteks pandemi Covid-19 (Humaedi dkk, 2021). Pemerintah memegang peranan yang begitu penting bagi penanganan bencana Covid-19 terutama dalam memutus rangkaian penularan Covid-19 di negara ini.



Gambar 1. Kerangka Kerja Pentahelix Penanganan Pandemi Covid-19 (Sumber: Humaedi dkk, 2021)

Pemerintah Indonesia setelah *World Health Organization* (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai *Global Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020 yakni dengan menetapkan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020. Menindaklanjuti atas penetapan status tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Dengan demikian, pemerintah telah menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi langkah dalam penanganan wabah Covid-19. Sempat menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat, karena PSBB dianggap tidak efektif karena kenaikan kasus Covid-19 masih saja terjadi akhirnya pemerintah pun memutuskan mengeluarkan kebijakan baru PPKM pada 11 Januari 2021 (Tobing, 2021). PPKM digunakan pemerintah untuk menggantikan istilah PSBB. Kebijakan dalam

PPKM dinilai pemerintah sebagai upaya menangani pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai ini (Katadata.com, 2021). Kebijakan itu membatasi kegiatan masyarakat pada tingkat yang bersifat mikro dan makro. PPKM dilaksanakan per daerah yang mengalami lonjakan tinggi kasus Covid-19. Salah satu perubahan pembatasan pada PPKM mikro darurat adalah penerapan bekerja dari kantor (*work from office/WFO*) sebanyak 25% dari kapasitas kantor pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta yang berada di zona merah dan oranye. Berikutnya, pembelajaran daring tetap dilakukan secara daring, namun kegiatan sektor esensial dapat beroperasi 100%, dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Untuk tempat makan dan minum serta pusat perbelanjaan hanya dapat beroperasi hingga pukul lima sore. Kegiatan ibadah bersama ditiadakan sementara. Begitu pun dengan kegiatan lain di area publik ditutup sementara hingga dinyatakan aman.

Selain dengan pembatasan mobilitas masyarakat, upaya lain yang hingga saat ini dilakukan dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah melalui riset untuk menghasilkan vaksin (Masnun, Sulistyowati, Ronaboyd, 2021). Vaksinasi didukung dengan diterbitkan Perpres No.14/2021“Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19)”. Vaksinasi dilaksanakan oleh pemerintah dalam beberapa tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan waktu kedatangan (Ritunga dkk, 2021). Orang pertama Indonesia yang divaksin adalah Presiden Joko Widodo dengan vaksin-Sinovac. Selanjutnya jajaran menteri, tenaga kesehatan dan pegawai pemerintah dan kemudian disusul kalangan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan penderita dan penanggulangan Covid-19 (Stepahnie dkk, 2021). Indonesia melaksanakan vaksinasi Covid-19 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi Covid-19. Upaya vaksinasi Covid-19 secara massal yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia merupakan sebuah langkah positif dalam

menekan angka pertumbuhan pandemik (Ritunga dkk, 2021).

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang terdiri dari kata-kata tertulis dan lisan yang berasal dari narasumber (Moleong, L. J., 2010). Pendekatan kualitatif ini dipilih karena sesuai dengan tujuan peneliti, di mana penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi orang secara individual maupun kelompok (Syarifah dkk, 2020).

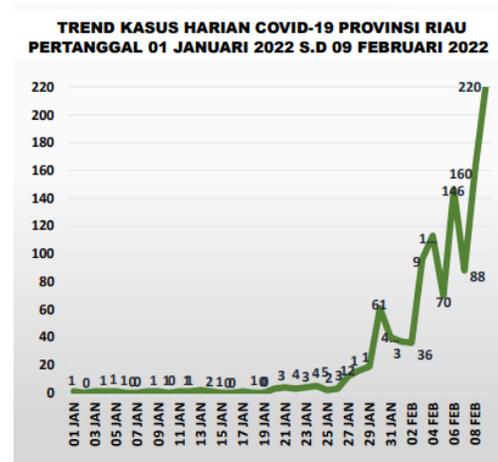
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang terdiri dari kata-kata tertulis dan lisan yang berasal dari narasumber (Moleong, L. J., 2010). Pendekatan kualitatif ini dipilih karena sesuai dengan tujuan peneliti, di mana penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi orang secara individual maupun kelompok (Syarifah dkk, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Terkini Covid-19 di Provinsi Riau

Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemik. Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia (Susilo Dkk, 2020). Berbagai penelitian terus dilakukan terkait dengan perkembangan virus ini, baik dalam aspek epidemiologi, virologi, patogenesis, gejala klinis, faktor risiko, maupun penatalaksanaan terkini terkait dengan berbagai varian yang masih muncul sampai hari ini.

Data perkembangan kasus Covid-19 Provinsi Riau per tanggal 09 Februari 2022 terpantau sebanyak 220 kasus terkonfirmasi dengan 59 kasus sembuh dan 1 kasus meninggal. Data terkait Hasil Pembobotan Skor dan Zonasi Risiko pada 6 Februari 2022 mengumumkan Zona Risiko Kasus masing-masing daerah di Provinsi Riau dengan rerata tiap daerahnya berisiko rendah. Meskipun begitu, beberapa daerah kini menerapkan PPKM level 1, diantaranya Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Kep. Meranti, Pekanbaru, dan Dumai, sementara PPKM level 2 diterapkan di beberapa daerah seperti Kampar, Bengkalis, Rohil, Siak, dan Kuansing. Dinas Kesehatan Provinsi Riau saat ini berfokus pada peningkatan kesiapsiagaan terkait lonjakan gelombang Covid-19 varian omicron diantaranya: (1) Promosi pola hidup sehat dan pengetatan pemberlakuan 3M, (2) Pembatasan aktivitas kontak antar masyarakat, (3) Percepatan vaksin, serta (4) Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit.



Gambar 2. Trend kasus harian Covid-19 Provinsi Riau Terkini (Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2022)

Kapabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam Mencegah Peningkatan Positivity Rate Covid-19 Varian Omicron

Penelitian ini berfokus pada kapabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam mencegah dan mengantisipasi kasus Covid-19 varian Omicron di Provinsi Riau. Kapabilitas didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki dalam menghadapi suatu ancaman/bencana. Menurut Kusumasari (2014), beberapa aspek

yang dapat dinilai dalam mengukur kapabilitas badan pemerintahan daerah terhadap penanggulangan bencana terbagi atas empat, diantaranya kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan, dan sumber daya teknis.

Dalam aspek kelembagaan, Dinas Kesehatan berfungsi sebagai Dinas teknis yang mempunyai tugas pokok diantaranya melaksanakan sebagai urusan pemerintah daerah dibidang kesehatan berdasarkan hakikat otonomi dan membantu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi pengembangan dan pembinaan pelayanan. Dalam penanggulangan Covid-19, Dinkes Provinsi Riau didukung dengan pengaturan kelembagaan yang efektif, dilihat dari struktur organisasi, peran, tugas, dan tanggung jawab yang jelas. Dalam melaksanakan perannya, organ Dinas Kesehatan Provinsi Riau terdiri dari kepala dinas, sekretaris, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan dan kefarmasian, dan unit pelaksana teknis.

Kelembagaan ini merupakan struktur terpadu yang berperan penting dalam penanggulangan kasus Covid-19 di Provinsi Riau. Dinas kesehatan provinsi menjalin koordinasi yang erat dengan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam upaya sosialisasi dan pemeriksaan kepada masyarakat untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Provinsi Riau berperan aktif dalam mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi terkait penanganan Covid-19 di Provinsi Riau melalui beberapa usaha seperti peningkatan kapasitas pemeriksaan dan penegakan diagnosis Covid-19, menjembatani koordinasi terpadu antar rumah sakit dalam penyediaan pelayanan terbaik dalam mencegah penyebaran Covid-19, di dalamnya termasuk penyediaan fasilitas kesehatan yang baik, serta melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait di Provinsi Riau.

Dilihat dari aspek sumber daya manusianya, pemerintah Provinsi Riau menggandeng segenap instansi dalam percepatan penanggulangan kasus Covid-19 varian Omicron. Gubernur Riau sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab dalam hal ini, membentuk Satuan Tugas Covid-19 (Satgas Covid-19) berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020

tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sehingga perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 di Provinsi Riau. Satgas Covid-19 yang terdiri dari elemen pemerintah seperti Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, dan berbagai instansi terkait, termasuk di dalamnya organ TNI dan Polri yang turut mendukung dalam percepatan vaksinasi masyarakat Provinsi Riau. Upaya kelembagaan ini cukup berhasil jika dinilai dari progress capaian vaksin Covid-19 di Provinsi Riau, dimana pencapaian vaksinasi dosis pertama per tanggal 9 Februari 2022 telah mencapai 89%, lebih tinggi dari rerata vaksinasi di Indonesia.

Tabel 1. Pencapaian Vaksinasi Dosis Pertama Covid-19 di Provinsi Riau Tahun 2021-2022



Berdasarkan grafik di atas percepatan capaian vaksinasi Covid-19 di Provinsi Riau sejak tanggal 1 Desember 2021 dengan capaian 51% dan sampai tanggal 09 Februari 2022 capaian meningkat menjadi 4.311.466 jiwa (89%) pada vaksinasi dosis pertama. Pencapaian vaksinasi ini tidak terlepas dari kinerja kelembagaan yang terpadu.

Kapabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam Mengantisipasi Peningkatan Positivity Rate Covid-19 Varian Omicron

Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.01/MENKES/1391/2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 Varian Omicron

(B.1.1.529) yang ditandatangani Menteri Kesehatan pada 30 Desember 2021, sebagai upaya menekan *positivity rate* kasus Covid-19 varian omicron di Indonesia. Terbitnya aturan ini untuk memperkuat sinergisme antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, SDM Kesehatan dan para pemangku kepentingan lainnya sekaligus menyamakan persepsi dalam penatalaksanaan pasien konfirmasi positif Covid-19 (sehatnegeriku.kemkes.go.id), mengingat per tanggal 4 Januari 2022, total terkonfirmasi 254 kasus positif Covid-19 varian omicron di Indonesia.

Penelitian awal menunjukkan adanya peningkatan risiko infeksi ulang pada varian Omicron dibandingkan varian lainnya. Selain itu, varian ini juga menunjukkan pertumbuhan yang cepat. Berdasarkan hal tersebut varian ini akan memberikan dampak yang merugikan secara epidemiologi (Amalia, 2021). Kasus Omicron yang terkonfirmasi di Provinsi Riau per tanggal 9 Februari 2022 sebesar 1 kasus positif dengan kasus konfirmasi *probable* omicron sebesar 621 kasus. Tingginya angka *probable* Omicron serta prediksi peningkatan kasus yang lebih besar dikemudian hari menjadikan pemerintah pusat, khususnya Pemerintah Provinsi Riau melakukan serangkaian upaya dalam mengantisipasi peningkatan kasus *positivity rate* Covid-19 varian Omicron ini.

Aspek kapabilitas dalam mengantisipasi peningkatan kasus *positivity rate* Covid-19 varian Omicron pada penelitian ini berfokus pada aspek sumber daya teknis yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau, diantaranya penyediaan tempat tidur di rumah sakit, ketersediaan ICU, ketersediaan fasilitas isolasi terpusat, ketersediaan obat dan vaksinasi Covid-19, serta pemantauan ketersediaan tabung oksigen.

Tabel 2. Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit di Provinsi Riau per tanggal 9 Februari 2022

ICU Rumah Sakit			
Tersedia	Terpakai	Tersisa	BOR

211	5	206	2%
-----	---	-----	----

Isolasi Rumah Sakit

Tersedia	Terpakai	Tersisa	BOR
----------	----------	---------	-----

1441	55	1386	4%
------	----	------	----

Berdasarkan tabel di atas ketersediaan tempat tidur rumah sakit di Provinsi Riau per tanggal 9 Februari 2022 yang dikategorikan tempat tidur ICU dan isolasi dengan masing-masing BOR 2% dan 4%.

Ketersediaan ICU di RS

Tabel 3. Ketersediaan ICU Rumah Sakit di Provinsi Riau per tanggal 9 Februari 2022

ICU dengan Ventilator

Tersedia	Terpakai	Tersisa	BOR
----------	----------	---------	-----

103	3	100	3%
-----	---	-----	----

ICU Tanpa Ventilator

Tersedia	Terpakai	Tersisa	BOR
----------	----------	---------	-----

108	2	106	2%
-----	---	-----	----

Berdasarkan tabel di atas ICU rumah sakit di Provinsi Riau per tanggal 9 Februari 2022 yang dikategorikan dengan ventilator dan tanpa ventilator masing-masing BOR 3% dan 2%.

Ketersediaan Fasilitas Isolasi Terpusat

Tabel 4. Ketersediaan Fasilitas Isolasi Terpusat di Provinsi Riau per tanggal 9 Februari 2022

Ketersediaan Kamar	Ketersediaan Tempat Tidur	Tempat Tidur Terpakai	Sisa
761	1663	23	1640

Berdasarkan tabel di atas fasilitas isolasi terpusat yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau per tanggal 9 Februari 2022 yang sedang terpakai 23 tempat tidur.

ketersediaan dan pemakaian oksigen yang didapatkan dari data *dashboard online* rumah sakit yang didapatkan secara *real time* di Provinsi Riau per tanggal 9 Februari 2022 dengan total ketersediaan stok oksigen yang melebihi kebutuhan oksigen yang diperlukan. Kapasitas yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau ini, merupakan upaya kontingensi dalam menghadapi perkiraan lonjakan kasus positif Covid-19 varian Omicron. meskipun demikian, dalam penanganan kasus Covid-19, pemerintah tetap berupaya lebih pada segi preventif, yang sejalan dengan pernyataan dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Drs. Masrul Kasmy, M.Si.

“... lebih baik mencegah dari pada mengobati oleh sebab itu anggaran yang kami lakukan untuk preventif jauh lebih besar pada pelayanan-pelayanan kesehatan seperti pamphlet, diskusi berbagai media, untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat terkait dampak buruk dari tingginya angka positif dari covid. Selain pamphlet di pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, baliho, tentang bahaya omicron, juga sosialisasi di televisi provinsi dan sudah menjadi paradigma bahwa penyakit ini berbahaya. (9/2/2022)

“Namun tentu ada beberapa informasi hoax terkait omicron ini. contoh di tingkat pelajar kini terjadi berita hoax sehingga banyak orang tua yang menolak untuk memvaksin anaknya kami rutin mengadakan gerakan germas, seperti

makanan yang bergizi, hidup berolahraga, dengan hidup sehat yang diharapkan pesannya dapat sampai ke masyarakat. Untuk rencana kontijensi kami melakukan koordinasi tiap bulan, BOR kami jaga untuk tetap tersedia, dengan prediksi untuk mengantisipasi membludaknya pasien hal ini, dan tentu saja penyesuaian di layanan-layanan rumah sakit, termasuk cadangan-cadangan rumah sakit, termasuk gedung olahraga sebagai cadangan jika terjadi ledakan angka covid.” (9/2/2022)

Tidak hanya menyiapkan rencana kontijensi sebagai bentuk kapabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam mengantisipasi lonjakan angka positif Covid-19 varian Omicron dengan sumber daya teknis yang ada, tetapi juga tetap berfokus pada aspek preventif seperti sosialisasi dengan berbagai media kepada masyarakat, serta pembasmian berita-berita hoax terkait Covid-19 dengan koordinasi terpadu antar instansi dan unsur *pentahelix* dalam penanggulangan bencana.

Kendala atau Hambatan yang Dihadapi Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam Penanganan Covid

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, ditemukan dua kendala utama dalam penanganan Covid-19 yang ada di Provinsi Riau, yakni ketersediaan fasilitas laboratorium yang mumpuni dalam penegakan diagnosa Covid-19 varian Omicron, serta kondisi geografis dari Provinsi Riau yang menjadi tantangan dalam pemerataan sosialisasi maupun vaksinasi. Terkait ketersediaan fasilitas laboratorium untuk mengkonfirmasi kasus Covid-19 varian Omicron masih belum tersedia di Provinsi Riau.

“Untuk menyatakan seseorang tergolong omicron harus dilakukan pemeriksaan khusus WGS untuk penegakan diagnosis Omicron. Untuk saat ini belum tersedia di Riau dan hanya di pusat saja, maka sampel pasien dikirim ke pusat untuk dianalisa, namun dari sampel yang dikirim hanya satu yang positif omicron, namun beberapa penyuluhan seperti yang dilakukan WHO, menyatakan bahwa ketika kasus probable maka kemungkinan untuk positif sekitar 80%. (9/2/2022)”

Tantangan terkait ketidaktersediaan laboratorium pemeriksaan khusus WGS untuk diagnosis Omicron menjadi salah satu tantangan yang dimiliki tidak hanya oleh Provinsi Riau, tetapi oleh berbagai provinsi lainnya mengingat fasilitas laboratorium ini hanya tersedia di Kota Jakarta sebagai sentra pemerintahan saat ini. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada lama waktu dan efektivitas penegakan diagnosis Covid-19 varian Omicron di Provinsi Riau. Selain tantangan ketersediaan laboratorium yang menunjang, pada paparannya, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau juga menggarisbawahi kondisi geografis provinsi yang terdiri dari beberapa pulau menjadikan mobilitas antar pulau sebagai tantangan dalam penanganan kasus Covid-19.

Pencapaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama, kedua dan ketiga setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau sampai tanggal 09 Februari 2022 dengan total capaian dosis pertama (89%), dosis kedua (59%) dan dosis ketiga (3%). Dari data diatas dapat dilihat bahwa program vaksinasi dosis pertama tertinggi di Kota Pekanbaru sebesar 110%, menyusul di Kabupaten Dumai sebesar 95% dan capaian vaksinasi dosis pertama terendah terjadi di Kepulauan Meranti (81%) dan Kampar (80%).

Dari laporan tingkat vaksinasi per kabupaten di atas, dapat dilihat bahwa Kepulauan Meranti dan Kampar menjadi dua daerah dengan tingkat vaksinasi terendah dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Ransang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap, Pulau Berembang, dan Pulau Burung. Letak geografis inilah yang menjadi tantangan dalam mobilitas satuan tugas (Satgas Covid-19) dalam melaksanakan program vaksinasi.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan berbagai aspek preventif, promotif, maupun kuratif dan rehabilitatif terkait kasus Covid-19 yang ada di Provinsi Riau dengan baik. Hal ini terbukti dengan berbagai upaya peningkatan maupun capaian yang

diperoleh oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Dalam aspek peningkatan kapasitas masyarakatnya, Dinas Kesehatan Provinsi Riau terus melakukan upaya percepatan vaksinasi pada semua kelompok sasaran, peningkatan upaya pencegahan penularan Covid-19, sampai dengan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit, tempat isolasi, maupun ketersediaan obat-obatan dan fasilitas penunjang lainnya.

Meskipun penanggulangan Covid-19 varian omicron sudah tergolong baik, pemerintah Provinsi Riau menghadapi tantangan penanganan Covid-19 dari aspek geografis, serta ketersediaan fasilitas laboratorium yang mumpuni. Beberapa upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya: (1) Melakukan upaya penguatan *testing, tracing, dan treatment* (3T), (2) Percepatan Vaksinasi Pada Semua Kelompok Sasaran, Baik Vaksinasi Dosis 1, Dosis 2 maupun Booster, (3) Melaksanakan Pengetatan dan Pengawasan Bagi Pelaku Perjalanan Melalui Darat, Laut Dan Udara Baik Dari Atau Keluar Provinsi Riau (Melalui E-HAC), (4) Mengoptimalkan Pemanfaatan Fasilitas Isolasi Terpusat (Isoter) Bagi Masyarakat Yang Terkonfirmasi COVID-19 bagi pasien asimtomatik dan gejala ringan, (5) Bagi Kasus Konfirmasi COVID-19 Dengan Bergejala Sedang dan Berat Dilakukan Perawatan Di RS Rujukan Se-provinsi Riau (6) Konversi 50 % TT RS dari total TT RS, penyediaan obat Covid-19 yang memadai, (7) Melakukan Pengetatan Terhadap Mobilitas Masyarakat Sesuai Dengan Level PPKM, dan (8) Mengoptimalkan Tim Mitigasi dan Komunikasi Perubahan Perilaku Untuk Peningkatan Edukasi Masyarakat Terkait 3M (Mencuci Tangan, Memakai Masker dan Menjaga Jarak). Peningkatan kapasitas dalam menghadapi Covid-19 di Provinsi Riau tentunya tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa kolaborasi dari unsur-unsur *pentahelix* yang terlibat, dalam hal ini pemerintah daerah setempat, badan usaha, masyarakat, akademisi, dan media.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, H., 2021. Omicron penyebab COVID-19 sebagai variant of concern. *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, 4(4), pp.139-141.

- Humaedi, M.A., Purwaningsih, S.S., Sundari, L.V. and Fathy, R., 2021. Membangun Kegotongroyongan Dan Mengaktifkan Peran Kepemimpinan Lokal: Strategi Pentahelix Penanganan Dampak Covid-19: Pentahelix's Strategy For Handling The Impact Of COVID-19. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(1).
- Katadata.co.id. 2021. "PPKM Darurat Akan Berlaku, Ini Perbedaan PSBB, PPKM, dan Lockdown" [cited 2022 Feb 15]. Available from: <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/60dc546f658cd/ppkm-darurat-akan-berlaku-ini-perbedaan-psbb-ppkm-dan-lockdown>.
- Kemkes RI. Kasus Konfirmasi Terus Meningkat, Kemenkes Terbitkan Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Varian Omicron. Jakarta: Kemenkes RI; [cites 2022 Feb 17]. available from: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220104/3839091/kasus-konfirmasi-terus-meningkat-kemenkes-terbitkan-surat-edaran-pencegahan-dan-pengendalian-covid-19-varian-omicron/>
- Kominfo RI. Tujuh hal yang perlu diketahui dari varian Omicron penyebab COVID-19 [poster]. Jakarta: Kominfo RI; 2021 [cited 2022 Feb 15]. Available from: <https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/7-hal-yang-perlu-diketahui-dari-varian-omicron-penyebab-covid-19>
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Masnun, M.A., Sulistyowati, E. and Ronaboyd, I., 2021. Perlindungan hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab negara pemenuhan vaksin dalam mewujudkan negara kesejahteraan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), pp.35-47.
- Ritunga, I., Lestari, S.H., Santoso, J.L., Effendy, L.V., Siahaan, S.C.P.T., Lindarto, W.W., Nurhadi, S., Irham, I.M.M. and Monica, T., 2021. Penguatan Program Vaksinasi Covid-19 Di Wilayah Puskesmas Made Surabaya Barat. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 5(1), pp.45-52.
- Stephanie, P.D., Enjelina, S., Angelica, M.F. and Martinelli, I., *Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia*. Prosiding Senapenmas, pp.1263-1270.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Syapitri, H., Tarigan, F. and Saragih, O., 2021. Sinergi Pentahelix Sebagai Komitmen Memutus Mata Rantai Penularan Covid-19 Melalui Pos Gagah Di Wilayah Mebidang. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 4(2), pp.417-424.
- Syarifah, S., Poli, D., Ali, M., Rahmat, H., Widana, I. 2020. Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, pp.398-407.